

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD 2010-2015 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya (2015-2020). Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

Melalui pedoman transisi ini, maka diharapkan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru dapat terselesaikan

Perubahan terhadap dokumen RPJMD dimungkinkan apabila hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda menunjukkan bahwa proses dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan dan atau telah terjadi perubahan yang mendasar yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kepentingan nasional dan daerah yang mana perubahan dokumen RPJMD tersebut dituangkan atau ditetapkan dengan peraturan daerah.

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 ini juga merupakan pedoman bagi SKPD Kabupaten dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2011-2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing sehingga terwujud kesamaan arah dan upaya pembangunan di masing-masing SKPD untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Selanjutnya RPJMD ini akan menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

SKPD serta para pemangku kepentingan wajib melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya dan Bappeda wajib melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD dalam Renstra SKPD. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD ini dapat dicapai selama ada sinergitas usaha antara SKPD dan seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itulah SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.